



# Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan *Value for Money* di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022)

Michelle Prajna Prameswari<sup>1\*</sup>, Rizki Ananda Safitri<sup>2</sup>, Nok Karima<sup>3</sup>, Ade Gunawan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan

**Abstrak:** Penelitian ini menggunakan teknik value for money bertujuan untuk menguji kinerja keuangan sektor publik di Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan anggaran pemerintah kota mematuhi prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Rasio ekonomi meningkat dari 92,40% (2021) menjadi 94,58% (2022), menurut data, yang mengindikasikan penggunaan anggaran yang lebih ekonomis. Namun demikian, rasio efisiensi turun dari 100% (2021) menjadi 104% (2022), menunjukkan bahwa alokasi sumber daya perlu ditingkatkan. Pada angka 103,89% (2021) dan 100,41% (2022), rasio efektivitas masih positif, yang mengindikasikan konsistensi dalam mencapai target pendapatan. Studi ini menekankan pentingnya manajemen dan perencanaan anggaran yang lebih strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, *Value for Money*, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2014>

\*Correspondence: Michelle Prajna

Prameswari

Email:

[michelle.prajna.prameswari@mhs.uingu.sdur.ac.id](mailto:michelle.prajna.prameswari@mhs.uingu.sdur.ac.id)

Received: 22-11-2024

Accepted: 22-12-2024

Published: 21-01-2025



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study uses the value for money technique to examine the financial performance of the public sector in Pekalongan City in 2021-2022. This method is used to evaluate the extent to which the city government's budget management adheres to the principles of economy, efficiency, and effectiveness. The economy ratio increased from 92.40% (2021) to 94.58% (2022), according to the data, indicating a more economical use of the budget. However, the efficiency ratio dropped from 100% (2021) to 104% (2022), indicating that resource allocation needs to be improved. At 103.89% (2021) and 100.41% (2022), the effectiveness ratio is still positive, indicating consistency in achieving revenue targets. This study emphasizes the importance of more strategic budget management and planning to improve the effectiveness, efficiency and transparency of local financial management.

**Keywords:** Financial Performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness

## Pendahuluan

Pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan sektor publik dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab (Dama, Wahdah, Mahadi, & Nasila, 2024). Setiap pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Pekalongan, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola dana yang diterimanya dalam rangka

memenuhi tujuan pembangunan yang telah ditetapkan di bidang sosial, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara yang dapat memaksimalkan hasil dengan tetap menjunjung tinggi prinsip value for money. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah tiga prinsip utama dari metode value for money ini (Imsar & Saragih, 2023). Efektivitas menjamin bahwa tujuan dan hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, efisiensi menjamin bahwa setiap anggaran digunakan semaksimal mungkin, dan ekonomi menuntut agar setiap pengeluaran dilakukan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas (Khusaini, Ashar, & Maski, 2021). Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbatasan anggaran daerah yang harus digunakan secara hati-hati membuat konsep-konsep tersebut harus dipraktikkan di Kota Pekalongan.

Meskipun demikian, Kota Pekalongan masih menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan dalam menerapkan value for money dalam pengelolaan keuangan publik. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara alokasi anggaran dan pencapaian target kinerja di beberapa bidang, termasuk infrastruktur dan kesehatan, berdasarkan data dari laporan keuangan Kota Pekalongan tahun 2022. Salah satu topik krusial yang sering dikaji di sektor publik, terutama oleh pemerintah, adalah kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab pemerintah, terutama sejak sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan (Ayu, 2022). Hasil yang optimal tidak selalu berkorelasi dengan alokasi anggaran yang besar, yang menunjukkan adanya kemungkinan inefisiensi dan kurangnya tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Alokasi dana yang besar, misalnya, seharusnya berdampak besar pada kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di sektor kesehatan, namun pada praktiknya, sebagian masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Pemborosan dan alokasi yang kurang terfokus dapat mempersulit pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan (Rijani, Munawarah, & Mahdalina, 2024a).

Penerapan value for money di Kota Pekalongan menjadi sangat penting mengingat meningkatnya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dari anggaran yang terbatas. Pemerintah Kota Pekalongan dapat mengevaluasi pengelolaan anggaran secara lebih menyeluruh, menentukan apakah anggaran yang dialokasikan telah memberikan hasil yang diinginkan, dan menentukan area yang perlu ditingkatkan dengan menggunakan strategi value for money. Pemerintah seharusnya dapat mengidentifikasi kesenjangan yang menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran melalui evaluasi value for money. Identifikasi ini penting bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran, memangkas pemborosan, dan memastikan dana dialokasikan sesuai dengan prioritas utama masyarakat. Agar masyarakat dapat melihat bahwa anggaran dikelola dengan baik dan memenuhi harapan mereka, strategi ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi (Rijani, Munawarah, & Mahdalina, 2024b). Selain itu, jika masyarakat melihat dampak yang sebenarnya dari setiap investasi publik, kepercayaan mereka terhadap pemerintah dapat tumbuh.

Pendekatan *value for money* digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan daerah dalam dua penelitian. Penelitian oleh (Sanger, Manossoh, & Korompis, 2023) mengevaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Hasilnya menunjukkan tingkat ekonomi 78,8%, efisiensi 98,2%, dan efektivitas 92,5%, dengan peluang perbaikan pada optimalisasi pengeluaran untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Sementara itu, penelitian oleh (Mulyaningsih, 2023) menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru selama 2018–2020. Hasilnya menunjukkan sebagian besar inisiatif hemat biaya, meskipun ditemukan ketidakefisienan yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam alokasi sumber daya dan perencanaan anggaran. Secara keseluruhan, penerapan pendekatan *value for money* memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian kinerja organisasi sektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan teknik *value for money* untuk menganalisis secara menyeluruh kinerja keuangan sektor publik di Kota Pekalongan pada tahun 2022. Diharapkan studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang sejauh mana konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah diterapkan dalam administrasi anggaran kota. Studi ini juga akan membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan saran-saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Diharapkan pemerintah Kota Pekalongan dapat meningkatkan tata kelola keuangan publik, memaksimalkan pengeluaran, dan meningkatkan standar pelayanan publik dengan adanya penelitian yang menyeluruh ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan tentang penggunaan *value for money* di sektor publik, khususnya di Indonesia, dan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain yang ingin menerapkan strategi *value for money* untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Pemerintah harus menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran publik dilakukan secara efektif dan dapat memberikan hasil yang terukur di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Salah satu alat terbaik untuk pengelolaan anggaran yang lebih strategis adalah pendekatan *value for money*, yang menekankan pada proses pengelolaan anggaran yang efektif dan ekonomis serta produk akhir. Diharapkan bahwa dengan menerapkan *value for money*, pemerintah daerah dapat meningkatkan standar pelayanan publik dan secara bersamaan menumbuhkan kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam membuat kebijakan anggaran yang lebih baik di masa yang akan datang dan dapat menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain untuk meningkatkan pengelolaan keuangan mereka dengan mengadopsi pendekatan *value for money*.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan sektor publik Kota Pekalongan dengan menggunakan konsep value for money (Bieńkowska, 2024). Pendekatan penelitian deskriptif digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih yang berdiri sendiri. Menurut (Ansori & Iswati, 2017), metode ini tidak mengharuskan untuk membandingkan variabel secara langsung atau mencari tahu bagaimana hubungan satu sama lain. Metode ini bekerja dengan baik untuk memberikan penilaian yang tidak bias terhadap ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan sektor public (Ibrahim, 2022).

Mengevaluasi kinerja keuangan sektor publik adalah tujuan utama dari penelitian evaluatif semacam ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah praktik pengelolaan keuangan telah sesuai dengan kriteria value for money (Coles, 2024). Data sekunder dari laporan keuangan pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2022 digunakan dalam penelitian ini. Melalui studi dokumentasi, catatan keuangan dan kinerja organisasi sektor publik Kota Pekalongan dikumpulkan, diperiksa, dan dievaluasi. Rasio keuangan yang terkait dengan value for money digunakan untuk menganalisis data:

### 1. *Ekonomi*

Komponen input merupakan fokus utama dari pengukuran ekonomi. Menurut (Mardiasmo, 2009), ekonomi adalah perbandingan antara input dan nilai input, dimana input adalah target anggaran dan nilai input adalah realisasi anggaran. Rumus berikut ini digunakan untuk menghitung pengukuran unsur ekonomi secara matematis dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$Ekonomi = \frac{Input}{Input\ Value} \times 100\%$$

Menurut statistik ekonomi, berikut ini adalah skala penilaian elemen ekonomi (Pratama, Syamsuddin, & Difa, 2022).

Jika hasilnya < 100%, hal ini mengindikasikan ekonomi

Jika hasilnya = 100%, berarti ekonomi seimbang.

Jika hasilnya > 100%, berarti tidak hemat biaya.

### 2. *Efisiensi*

Mencari rasio input terhadap output adalah salah satu metode untuk menilai efisiensi. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa organisasi tersebut lebih efektif, menurut Indra Bastian dalam (Supadmini & Kristiani, 2018). Berikut rumus yang digunakan untuk menentukan penilaian elemen efisiensi.

$$Efisiensi = \frac{Input}{Output} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : keluaran/hasil dari suatu kegiatan/program

Input : sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program.

Berikut ini adalah ilustrasi evaluasi komponen indikator ekonomi (Pratama et al., 2022).

Jika hasilnya < 100%, hal ini menunjukkan efisiensi.

Hasil = 100% menunjukkan efisiensi yang seimbang.

Jika hasilnya > 100%, berarti tidak efisien.

### 3. Efektivitas

Jika organisasi sektor publik dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, maka organisasi tersebut dianggap efektif (Mardiasmo, 2009). Rumus berikut ini digunakan untuk menentukan penilaian elemen efektivitas.

Penilaian elemen Efektifitas dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$Efektivitas = \frac{Capaian\ Kinerja}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran elemen Efektifitas ditunjukkan sebagai berikut (Pratama et al., 2022).

Hasil < 100% menunjukkan efektivitas.

Hasil = 100% menunjukkan efektivitas yang seimbang.

Jika hasilnya > 100%, maka tidak ada gunanya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kinerja Keuangan

Data keuangan, seperti APBD dan RAPBD tahun 2021-2022 yang termuat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekalongan tahun 2021-2022 digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Pekalongan.

**Tabel 1.** Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021-2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>Pendapatan</b>	<b>930,156,232,000.00</b>	<b>984,981,114,000.00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>214,208,310,000.00</b>	<b>255,833,693,000.00</b>
Pajak Daerah	82,200,000,000.00	94,600,000,000.00
Retribusi Daerah	16,282,910,000.00	21,394,190,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,803,900,000.00	6,434,053,000.00
Lain-lain PAD yang Sah	109,921,500,000.00	133,405,450,000.00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>690,242,857,000.00</b>	<b>729,147,421,000.00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	<b>602,819,457,000.00</b>	<b>616,547,809,000.00</b>
Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH)	26,993,201,000.00	29,161,053,000.00
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	426,399,738,000.00	424,436,748,000.00
Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK)	127,896,993,000.00	162,950,008,000.00

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	21,529,525,000.00	4,696,260,000.00
Dana Insentif Daerah (DID)	21,529,525,000.00	4,696,260,000.00
Transfer Pemerintah - Provinsi	87,423,400,000.00	107,903,352,000.00
Pendapatan Bagi Hasil	78,870,400,000.00	72,380,352,000.00
Bantuan Keuangan	8,553,000,000.00	35,523,000,000.00
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>25,705,065,000.00</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah	2,718,000,000.00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	22,987,065,000.00	-
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1,041,206,081,000.00</b>	<b>1,090,187,786,000.00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>848,502,419,000.00</b>	<b>875,750,364,000.00</b>
Belanja Pegawai	420,853,844,000.00	402,701,524,000.00
Belanja Barang dan Jasa	391,265,135,000.00	428,282,140,000.00
Belanja Hibah	35,570,690,000.00	40,685,631,000.00
Belanja Bantuan Sosial	812,750,000.00	4,081,069,000.00
<b>Belanja Modal</b>	<b>178,869,825,000.00</b>	<b>207,694,427,000.00</b>
Belanja Modal Tanah	11,443,780,000.00	7,951,500,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,532,373,000.00	58,261,080,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53,443,379,000.00	36,507,948,000.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70,860,468,000.00	102,600,814,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,589,825,000.00	2,373,085,000.00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>13,833,837,000.00</b>	<b>6,742,995,000.00</b>
Belanja Tidak Terduga	13,833,837,000.00	6,742,995,000.00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(111,049,849,000.00)</b>	<b>(105,206,672,000.00)</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>		
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>112,549,849,000.00</b>	<b>115,326,672,000.00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112,542,301,000.00	115,326,672,000.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7,548,000.00	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>10,120,000,000.00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	1,000,000,000.00	7,120,000,000.00
Penyertaan Modal Daerah	500,000,000.00	3,000,000,000.00

<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>111,049,849,000.00</b>	<b>105,206,672,000.00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Pekalongan (2021-2022)

**Tabel 2.** Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021-2022

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>966,372,557,051.02</b>	<b>989,013,074,926.00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>252,037,004,472.02</b>	<b>263,475,949,166.00</b>
Pajak Daerah	87,382,426,252.00	101,303,223,640.00
Retribusi Daerah	14,748,214,704.00	19,088,524,378.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,805,514,149.00	6,434,311,659.00
Lain-lain PAD yang Sah	144,100,849,367.02	136,649,889,489.00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>686,765,223,608.00</b>	<b>725,537,125,760.00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	<b>607,835,271,117.00</b>	<b>613,870,006,760.00</b>
Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH)	34,377,457,237.00	33,880,707,425.00
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	426,399,738,000.00	424,427,248,179.00
Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK)	125,528,550,880.00	155,562,051,156.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	<b>21,529,525,000.00</b>	<b>4,696,260,000.00</b>
Dana Insentif Daerah (DID)	21,529,525,000.00	4,696,260,000.00
Transfer Pemerintah - Provinsi	<b>78,929,952,491.00</b>	<b>106,970,859,000.00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	76,876,982,891.00	72,380,352,000.00
Bantuan Keuangan	2,052,969,600.00	34,590,507,000.00
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>27,570,328,971.00</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah	2,718,266,084.00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24,852,062,887.00	-
<b>Belanja Daerah</b>	<b>962,091,792,004.00</b>	<b>1,031,090,188,444.02</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>792,174,652,718.00</b>	<b>830,611,301,706.02</b>
Belanja Pegawai	391,695,115,554.43	375,774,559,810.00
Belanja Barang dan Jasa	367,573,741,624.57	413,865,972,418.00
Belanja Hibah	32,149,226,539.00	37,814,800,008.00
Belanja Bantuan Sosial	756,569,000.00	3,155,969,470.00
<b>Belanja Modal</b>	<b>160,513,725,170.00</b>	<b>196,569,439,074.00</b>
Belanja Modal Tanah	11,302,754,180.00	4,442,465,169.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,536,785,604.00	55,027,762,176.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,754,919,045.00	35,349,620,557.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,561,969,736.00	99,405,993,613.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,357,296,605.00	2,343,597,559.00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>9,403,414,116.00</b>	<b>3,909,447,664.00</b>
Belanja Tidak Terduga	9,403,414,116.00	3,909,447,664.00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>4,280,765,047.02</b>	<b>(42,077,113,518.02)</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>		
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>112,545,906,136.00</b>	<b>115,339,443,911.02</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112,542,301,590.00	115,326,671,183.02
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3,604,546.00	12,772,728.00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>10,141,780,818.00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	1,000,000,000.00	7,141,780,818.00
Penyertaan Modal Daerah	500,000,000.00	3,000,000,000.00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>111,045,906,136.00</b>	<b>105,197,663,093.02</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>115,326,671,183.00</b>	<b>63,120,549,575.00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Pekalongan (2021-2022)

## 2. Rasio Ekonomi

Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu dengan harga terbaik (hemat). Penghematan berfungsi sebagai dasar untuk memeriksa seberapa besar organisasi sektor publik dapat mengurangi pemborosan dan pengeluaran yang tidak efektif untuk menurunkan konsumsi sumber daya mereka (Aulia & Nugraheni, 2022). Tujuan dari ekonomi adalah untuk membelanjakan uang sesedikit mungkin untuk mencegah pemborosan. Jika pengeluaran aktual kurang dari jumlah yang dianggarkan, maka pengeluaran tersebut dianggap ekonomis (Widianti, Fitriyah, & S, 2022). Rasio ekonomi, yang menggunakan informasi dari anggaran belanja dan realisasinya, merupakan alat untuk mengukur jumlah penghematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh entitas sektor publik (Prasetia, Saladin, & Nurmala, 2024).

**Tabel 3.** Rasio Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomi
2021	962.091.792.004,00	1.041.206.081.000,00	92,40%%
2022	1.031.090.188.444,02	1.090.187.786.000,00	94,58%

Sumber: Laporan Keuangan Kota Pekalongan (2021-2022)

Berdasarkan realisasi pendapatan, tingkat efisiensi, dan realisasi biaya untuk menghasilkan pendapatan, tabel di atas menunjukkan kondisi ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan sebesar Rp962.091.792.004,00, sedangkan realisasi biaya sebesar Rp1.041.206.081.000,00. Pada tahun tersebut, efisiensi sebesar 92,40% tercapai. Tahun 2022 terjadi peningkatan pada biaya dan pendapatan. Pendapatan yang diterima naik menjadi Rp1.090.187.786.000,00, sedangkan realisasi biaya untuk menghasilkan pendapatan meningkat menjadi Rp1.031.090.188.444,02. Tingkat efisiensi juga meningkat dengan peningkatan ini, mencapai 94,58%. Pengelolaan keuangan yang lebih baik ditunjukkan dengan peningkatan tingkat efisiensi dari 92,40% di tahun 2021 menjadi 94,58% di tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan yang lebih besar menunjukkan bahwa pengeluaran telah dikelola dengan lebih baik, yang mengarah pada penggunaan anggaran yang lebih efisien, meskipun biaya untuk menghasilkan pendapatan meningkat (Shakerian, 2024). Kinerja ekonomi Kota Pekalongan selama dua tahun terakhir secara umum menunjukkan peningkatan.

### 3. Rasio Efisiensi

Jika sebuah lembaga sektor publik dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal, maka lembaga tersebut dianggap efisien. Demikian pula, jika prosedur operasional menggunakan sumber daya yang paling sedikit, maka prosedur tersebut dianggap efisien. Rasio input terhadap output digunakan untuk mengukur efisiensi. Pemerintah daerah dianggap efisien jika rasionya kurang dari 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio efisiensinya, maka kinerjanya semakin baik. Perbandingan antara anggaran pengeluaran dan pendapatan dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan (Andriani, 2012).

**Tabel 3.** Rasio Efisiensi Kota Pekalongan Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Biaya untuk		Rasio Efektivitas
	Memperoleh Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
2021	962.091.792.004,00	966.372.557.051,02	100%
2022	1.031.090.188.444,02	989.013.074.926,00	104%

Sumber: Laporan Keuangan Kota Pekalongan (2021-2022)

Berdasarkan tabel di atas, capaian Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2021 menunjukkan rasio 100%, yang mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2021 menghasilkan outcome yang efektif. Sebaliknya, capaian Pemerintah Daerah Kota Pekalongan pada tahun 2022 menunjukkan rasio 104%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kota Pekalongan pada tahun 2022 menghasilkan outcome yang tidak efektif. Penyebab dari kinerja yang tidak efisien tersebut adalah realisasi pendapatan Kota Pekalongan pada tahun 2022 lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

Peningkatan rasio efisiensi dari 100% menjadi 104% mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Pekalongan harus meningkatkan kinerja efisiensi keuangannya untuk mencapai target tertinggi dengan sumber daya yang paling sedikit.

#### 4. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah Indikator seberapa baik perusahaan atau pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pendapatan atau pelaksanaan program (Sari & Yousida, 2019). Rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik suatu organisasi mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tingkat pencapaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan meningkat dengan rasio efektivitas, yang pada gilirannya menunjukkan kualitas dan kemandirian manajemen sumber daya saat ini. Hal ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa uang publik digunakan seefisien mungkin dan bahwa kebijakan yang diberlakukan benar-benar memberikan dampak yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

**Tabel 4.** Rasio Efektivitas Kota Pekalongan Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas
2021	Rp 966.372.557.051,02	Rp 930.156.232.000,00	103,89%
2022	Rp 989.013.074.926,00	Rp 984.981.114.000,00	100,41%

Sumber: Laporan Keuangan Kota Pekalongan (2021-2022)

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas untuk Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 rasio efektivitas mencapai 103,89%, sedangkan pada tahun 2022 tercatat sebesar 100,41%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada kedua tahun tersebut, kinerja pemerintah daerah tergolong efektif, dengan tahun 2021 berada pada kategori sangat efektif karena realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, meskipun nilai efektivitasnya sedikit menurun, target pendapatan tetap tercapai dengan baik. Perbandingan ini mencerminkan stabilitas dalam kemampuan pemerintah Kota Pekalongan untuk merealisasikan pendapatan daerah sesuai dengan targetnya. Penurunan kecil dalam rasio efektivitas pada tahun 2022 dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertajam strategi pengelolaan pendapatan, terutama dari sumber-sumber yang belum optimal. Salah satu penanda keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pendapatan, yang secara keseluruhan berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan kinerja yang baik.

## Simpulan

Penelitian ini menggunakan metode value for money, studi ini mengkaji kinerja fiskal sektor publik Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022. Berdasarkan hasil temuan, rasio ekonomi Kota Pekalongan meningkat dari 92,40% pada tahun 2021 menjadi 94,58% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran digunakan secara lebih efektif meskipun pengeluaran masih meningkat. Namun, rasio efisiensi menghasilkan temuan yang kontradiktif. Sementara tahun 2022 mengalami penurunan efisiensi dengan rasio 104%, yang menunjukkan perlunya manajemen biaya yang lebih baik, tahun 2021 memiliki rasio 100%, yang menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2021 sudah efisien. Dengan rasio efisiensi sebesar 103,89% pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 100,41% pada tahun 2022, Kota Pekalongan masih dapat mencapai target pendapatan. Namun, target pendapatan tetap tercapai, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah stabil. Selain itu, ditemukan beberapa masalah, termasuk pengelolaan sumber daya yang tidak efektif pada tahun 2022. Pemerintah Kota Pekalongan harus meningkatkan alokasi anggaran dan teknik pengelolaannya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan pemangkasan pemborosan, untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menjadikannya lebih efisien dan efektif. Dengan menyoroti pentingnya penggunaan prinsip value for money dalam manajemen keuangan sektor publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Pekalongan dan daerah lain dalam membuat kebijakan keuangan yang lebih ekonomis, efisien, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Andriani, Sri. (2012). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Ansori, Muslich, & Iswati, Sri. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Surabaya: Airlangga University Press.
- Aulia, Erlinda Nur, & Nugraheni, Agustina Prativi. (2022). Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 413–420. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>
- Ayu, Isna. (2022). *Implikasi Kinerja Keuangan Terhadap Nilai dan Keuntungan Bisnis*. 2017.
- Bieńkowska, J. (2024). Integrating qualitative and quantitative methods: a balanced approach to management research. *Eastern Journal of European Studies*, 15(1), 345–360. <https://doi.org/10.47743/ejes-2024-0115>
- Coles, T. (2024). Quality of Life in Adults with Chronic Cough: A Mixed Methods Study Informing the Development of a Quantitative Patient Preference Study. *Patient*, 17(3), 253–262. <https://doi.org/10.1007/s40271-023-00654-7>

- Dama, Desi Putri, Wahdah, Ghoriqna Fibahril, Mahadi, Nur Rizky Putri, & Nasila, Rahmat. (2024). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2025. *Communnity Development Journal*, 5(5), 9135–9141.
- Ibrahim, M. A. (2022). Quantitative Structure-Activity Relationship (Qsar) Study Of Newly Synthesized Carbonyl Thiourea Derivatives On Acanthamoeba Sp. *Malaysian Journal of Analytical Sciences*, 26(3), 457–477. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85133347520&origin=inward>
- Imsar, Imsar, & Saragih, Rizky Febrian. (2023). Pembenahan Terhadap Siklus Keuangan Menggunakan Metode Value for Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(4), 8–17.
- Khusaini, Mohamad, Ashar, Khusnul, & Maski, Ghazali. (2021). *Manajemen Belanja Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Andi Offset.
- Mulyaningsih, Nita. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. 7(1), 26454–26465.
- Prasetia, Diana, Saladin, Hendri, & Nurmala, Nurmala. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI). *ECo-Fin*, 6(2), 441–451. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1172>
- Pratama, Versiandika Yudha, Syamsuddin, & Difa, Farah. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 149–155. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>
- Rijani, Muhammad, Munawarah, Munawarah, & Mahdalina, Mahdalina. (2024a). Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1, 214–223.
- Rijani, Muhammad, Munawarah, Munawarah, & Mahdalina, Mahdalina. (2024b). Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1, 214–223.
- Sanger, Gerald William, Manossoh, Hendrik, & Korompis, Claudia W. M. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1193–1202.
- Sari, Ifrita Indah, & Yousida, Imawati. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1), 129–142. <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.264>
- Shakerian, M. (2024). Development and application of a quantitative index for predicting unsafe behavior of shop floor workers integrating cognitive failure reports and best

---

worst method. *Soft Computing*, 28(13), 8379–8391. <https://doi.org/10.1007/s00500-024-09750-8>

Supadmini, Sri, & Kristiani, Indri. (2018). Analisis Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2016 Dengan Pendekatan Value For Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 29–42.

Widianti, I. Gusti Ayu, Fitriyah, Nur, & S, Adhitya Bayu. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kota Mataram. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i1.1464>